

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,
PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM
PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

SKRIPSI



**PUTRI DWI MAULIDYA
NIM B1033211029**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
TAHUN 2024**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Dwi Maulidya
Nim : B1033211029
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulisan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya

Pontianak, 18 November 2024

MATERAI
10.000

Putri Dwi Maulidya
Nim. B1033211029

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa :

Nama	:	Putri Dwi Maulidya
Nim	:	B1033211029
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik
Judul Artikel	:	“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”

Menyatakan bahwa artikel tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk diuji.

Dosen	Nama	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
Dosen Pembimbing Akademik	Nina Febriana Dosinta, S.E., M.Si.	21/11/2024	

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Putri Dwi Maulidya
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian	:	06 Desember 2024

Judul Skripsi :

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 18 November 2024

Putri Dwi Maulidya
NIM. B1033211029

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem
Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penanggung Jawab Yuridis

Putri Dwi Maulidya

B1033211029

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian : 06 Desember 2024

MAJELIS PENGUJI

MAJELIS PENGUJI	NAMA	TGL/BULAN/THN	TANDA TANGAN
Penguji 1	Nina Febriana Dosinta, S.E., M.Si.		
	NIP. 198002272006042001		
Penguji 2	Ika Nur Azmi, S.E., M.Ak., Ak., CA.		
	NIP. 199003152023212050		
Penguji 3	Muhammad Fahmi, S.E., M.M., Ak., CA.		
	NIP. 196806081999031003		
Penguji 4	Ayu Umyana, S.E., M.Sc.		
	NIP. 199209292019032019		

**Pontianak,
Mengetahui,
Ketua Program Studi**

**Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19790618 200212 2 003**

PERUNTUKAN

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura. Adapun peruntukan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumber referensi akademik.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan pihak-pihak lain yang tertarik pada topik serupa.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah dan instansi terkait.

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, seperti kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

3. Sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar atau acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, akuntansi, dan akuntabilitas di sektor publik. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya pengendalian dan pelaporan yang baik dalam mencapai tujuan yang jelas dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

4. Sebagai kontribusi dalam praktik akuntansi sektor publik.

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik akuntansi sektor publik dengan mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah.

Demikianlah peruntukan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik dalam bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan sektor publik.

Pontianak, 18 November 2024

Putri Dwi Maulidya

NIM. B1033211029

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**". Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

1. **Kepada Dosen Pembimbing**, Ibu Nina Febriana Dosinta, SE., M.Si., dan Ibu Ika Nur Azmi, SE., M.Ak., Ak, CA., yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Semua masukan dan saran yang diberikan sangat membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. **Kepada Bapak/Ibu Dosen Pengaji**, yang telah memberikan kritik dan saran konstruktif yang berguna untuk perbaikan skripsi ini.
3. **Kepada Orang Tua saya**, yang telah memberikan doa, dukungan, dan cinta yang tiada henti, yang membuat saya tetap semangat dan optimis dalam menyelesaikan studi ini.
4. **Kepada teman-teman seperjuangan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**, yang selalu memberikan semangat, ide, dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya.
5. **Kepada instansi atau lembaga yang terlibat dalam penelitian**, yang telah memberikan izin dan data yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan dari pihak terkait, penelitian ini tidak akan dapat berjalan dengan baik.
6. **Kepada Sahabat terbaik saya, Sulis Prihatin dan Uray Muharni Aprilia**, yang telah memberikan dukungan yang luar biasa dari awal pertama saya kuliah hingga saya bisa menyelesaikan segala tahapan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu,
yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik langsung maupun
tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Saya sangat menghargai
segala kontribusi yang telah diberikan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu
pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam
penyusunannya, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya
harapkan untuk perbaikan di masa depan.

Akhir kata, semoga apa yang telah saya pelajari dan hasilkan dalam skripsi ini
dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bidang akademik.

Pontianak, 18 November 2024

Putri Dwi Maulidya
NIM. B1033211029

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi/lembaga pemerintah pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengacu pada pertanggungjawaban atas tindakan dan program yang dilaksanakan pemerintah.

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan menggunakan kuesioner yang dikirimkan kepada responden. Sampel penelitian ini adalah 50 responden dari 14 satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi multivariat melalui perangkat lunak SPSS v25.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat. Namun, sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

Kata Kunci : Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Abstract

This research aims to analyze the effect of budget target clarity, accounting control, and reporting system on the performance accountability of government agencies/institutions in the Work Units within the Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan. Performance accountability of government agencies refers to the responsibility for actions and programs implemented by the government. The research method is quantitative, using questionnaires sent to respondents. The research sample included 50 respondents from 14 work units at the Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan, selected using the purposive sampling method. Data was analyzed using multivariate regression analysis through SPSS v25 software. The study's results stated that budget target clarity and accounting control had no significant impact on performance accountability in the work units of the Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan. However, the reporting system had a substantial effect on the performance accountability of government agencies in work units within the Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan.

Keywords : *budget targets; accounting control; reporting systems; performance accountability*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERTANGGUNGJAWABAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERUNTUKAN	vi-vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii-ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii-xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-7
1.1 LATAR BELAKANG	1-2
1.2 KESENJANGAN PENELITIAN	2-4
1.3 RUMUSAN MASALAH	4
1.4 TUJUAN PENELITIAN.....	4-5
1.5 KONTRIBUSI PENELITIAN.....	5-7
1.5.1 KONTRIBUSI PENELITIAN TEORITIS.....	5
1.5.2 KONTRIBUSI PENELITIAN PRAKTIS.....	5-7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8-12
2.1 LANDASAN TEORI	8
2.1.1 TEORI KEAGENAN	8
2.1.2 TEORI KOENTIGENSI	8
2.2 KAJIAN EMPIRIS	8-10
2.2.1 KEJELASAN SASARAN ANGGARAN.....	8
2.2.2 PENGENDALIAN AKUNTANSI	9
2.2.3 SISTEM PELAPORAN	9
2.2.4 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	9-10
2.3 KERANGKA KONSEPTUAL	10
2.4 HIPOTESIS PENELITIAN	10-12
BAB III METODE PENELITIAN	13-18
3.1 BENTUK PENELITIAN.....	13
3.2 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN	13
3.3 DATA.....	13-14
3.4 POPULASI DAN SAMPEL.....	14
3.5 VARIABEL PENELITIAN	14
3.6 OPERASIONAL VARIABEL.....	14-15

3.6.1	KEJELASAN SASARAN ANGGARAN.....	14
3.6.2	PENGENDALIAN AKUNTANSI	14-15
3.6.3	SISTEM PELAPORAN	15
3.6.4	AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	15
3.7	METODE ANALISIS	15-18
3.7.1	STATISTIK DESKRIPTIF	16
3.7.2	UJI VALIDITAS.....	16
3.7.3	UJI REALIBILITAS	16
3.7.4	UJI NORMALITAS	16-17
3.7.5	UJI MULTIKOLINIERITAS.....	17
3.7.6	UJI HETEROKEDASTISITAS	17
3.7.7	ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA.....	17-18
3.7.8	UJI HIPOTESIS KOEFISIEN DETERMINASI	18
3.7.9	UJI T	18
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	19-26
4.1	HASIL PENELITIAN.....	19-25
4.2	PEMBAHASAN	25-26
4.2.1	PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	25
4.2.2	PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	25-26
4.2.3	PENGARUH SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	26
	BAB V PENUTUP.....	27
5.1	SIMPULAN	27
5.2	KETERBATASAN	27
5.3	REKOMENDASI	27
	DAFTAR PUSTAKA.....	28-32

DAFTAR TABEL

4.1 UJI NORMALITAS	19
4.2 UJI VALIDITAS	19-21
4.3 UJI RELIABILITAS	22
4.4 UJI MULTIKOLINIERITAS	22
4.5 UJI HETEROSKEDASTISITAS.....	23
4.6 ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA.....	23
4.7 UJI KOEFISIEN DETERMINASI.....	24
4.8 UJI T	24

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 PAPARAN SAKIP LKJIP KEMENTERIAN HUKUM DAN GAM RI OLEH BIRO PERENCANAAN, SEKRETARIAT JENDERAL	2
GAMBAR 2.2 KERANGKA KONSEPTUAL	10

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DAFTAR PERTANYAAN/KUESIONER..... 33-55

LAMPIRAN 2. HASIL KUESIONER 56-60

LAMPIRAN 3. LEMBAR HASIL PLAGIAT 61-64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan publik terhadap organisasi sektor publik dalam hal akuntabilitas kinerja semakin kuat seiring dengan meningkatnya kesadaran dan harapan masyarakat mengenai transparansi dan efektivitas pemerintah. Akibatnya, akuntansi pemerintahan harus memiliki akuntabilitas publik agar pemerintahan yang baik dapat terjadi. Dalam Inpres 7/1999 menetapkan bahwa unit pemerintah harus bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugasnya, serta wewenang yang diberikan. Akuntabilitas telah menjadi prinsip umum dalam pengelolaan pemerintahan. Sesuai Perpres No. 29 Th. 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas didefinisikan sebagai tanggung jawab lembaga pemerintah untuk menyampaikan hasil atau ketidakberhasilan dalam menjalankan program atau kegiatan yang ditugaskan kepada pemilik kepentingan, dengan tujuan meraih visi dan misi organisasi secara terukur. Satu diantara prinsip utama mengenai konsep *good governance* (pemerintahan yang baik) yakni akuntabilitas, didasarkan pada gagasan tidak ada tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; “Segala tindakan atau aktivitas pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.”

Menurut Jatmiko (2020), akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab pemerintah sebagai agen dalam menyampaikan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan dan aktivitas yang telah dilakukan kepada masyarakat yang memiliki wewenang dalam meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Syah (2021), akuntabilitas dibutuhkan untuk memastikan tidak ada pemborosan yang dapat mempengaruhi sumber daya publik. Selain itu, pertanggungjawaban atas pelaporan keuangan pemerintah berfokus pada apakah dana digunakan sesuai dengan anggaran dan peraturan yang berlaku (Melia & Sari, 2019). Ironisnya, berdasarkan pada hasil pengawasan dan evaluasi Menpan-RB, ada beberapa bukti mengindikasikan akuntabilitas masih lemah dan SAKIP belum diterapkan secara efektif dan konsisten. Salah satu contohnya kurangnya komitmen untuk mengutamakan akuntabilitas dari sisi kinerja,

menyebabkan kurangnya perhatian yang diberikan kepada akuntabilitas di level kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (www.menpan.go.id, 2024).



Gambar 1.1 Paparan SAKIP LKJIP Kementerian Hukum dan HAM RI oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal

Mengacu pada hasil evaluasi SAKIP, Kemenpan-RB memberikan Kementerian Hukum dan HAM nilai "BB" selama 3 tahun terakhir. Nilai ini belum memenuhi target yang ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM sendiri. Target untuk akuntabilitas kinerja masih belum tercapai, tetapi Kementerian Hukum dan HAM telah berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkannya.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Menurut sumber data kajian sebelumnya, tidak ada penelitian mengenai akuntabilitas kinerja di Kementerian Hukum dan HAM dan satuan kerjanya (Berdasarkan pencarian penulis di Website Sinta.kemdikbud.go.id dan Mendeley.com). Dengan demikian, penulis memilih untuk melakukan penelitian pada UPT di lingkup Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Kalimantan Barat.

Herawaty (2014) mengidentifikasi lima faktor—sistem pelaporan, penggunaan anggaran basis kinerja, pengendalian akuntansi, dan motivasi, serta kejelasan tujuan anggaran yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja. Riset ini berupaya mengkaji secara empiris terkait pengaruh pengendalian akuntansi,

sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Satu diantara elemen yang mempunyai pengaruh pada akuntabilitas kinerja ialah kejelasan sasaran anggaran. Sasaran anggaran yang jelas dapat memberikan kemudahan bagi lembaga pemerintah baik pusat dan daerah dalam mempertanggungjawabkan kegagalan ataupun keberhasilannya dalam upaya pencapaian sasaran yang telah dicanangkan (Precilia & Mimba, 2020). Anggaran yang jelas berperan penting dalam akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah karena memfasilitasi transparansi dan pengawasan. Ketika anggaran disusun dengan rinci memungkinkan publik dan pengawas untuk memantau dan mengevaluasi bagaimana anggaran digunakan. Ini juga menyediakan indikator dan target yang membantu lembaga dalam mengukur pencapaian tujuan organisasi (Suryani & Pujiono, 2020). Dengan anggaran yang terstruktur, pengeluaran dapat dikendalikan dan diawasi dengan lebih baik, mempermudah instansi pemerintah untuk menjelaskan penggunaan anggaran kepada pemangku kepentingan.

Selain itu, anggaran yang jelas mendukung perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, serta membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan. Dengan demikian, anggaran yang terperinci memperkuat akuntabilitas dengan memastikan penggunaan dana yang optimal dan efektif. Hasil riset sebelumnya oleh Kharisma, Rahayu, Yudi (2021) menyimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi sangat dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran. Selain itu, studi yang dilakukan Priatna dan Nuraisyah (2018), juga menyimpulkan hal yang selaras pada pemerintah Desa Kecamatan Cisewu. Akan lebih mudah untuk memperhitungkan keberhasilan maupun kegagalan organisasi jika tujuan anggarannya jelas.

Komponen lain yang memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas adalah pengendalian akuntansi. Pemerintah memiliki kemampuan untuk mengawasi dan menilai seluruh operasi dan tanggung jawabnya melalui pengendalian akuntansi. Ini dibutuhkan guna mengevaluasi seberapa hemat biaya, efektif, dan efisien kegiatan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Menurut studi

sebelumnya oleh Harianto D., Kennedy, Zarefar A. (2021), akuntabilitas kinerja pada SKPD Rokan Hilir dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengendalian akuntansi. Namun riset Yulianti, Astri Furqani (2023) mengungkapkan hasil sebaliknya.

Aspek lain yang berdampak terhadap akuntabilitas kinerja adalah sistem pelaporan. Sistem pelaporan merupakan sistem yang mengumpulkan data tentang aktivitas, hasil, dan dampak dari suatu organisasi untuk mengevaluasi efektivitasnya dan menciptakan keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Dalam kapasitasnya untuk mengelola dana publik, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk menyajikan data keuangan secara akurat, relevan, konsisten, dan andal. Meskipun studi oleh Ariyandani, Chalid, Umar (2020) & Azizah (2020) menyatakan sistem pelaporan meningkatkan akuntabilitas kinerja, riset yang dilakukan Anastasia D. R. (2018) memiliki hasil yang berbeda yaitu akuntabilitas kinerja tidak dipengaruhi oleh sistem pelaporan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat?
- 2) Bagaimana pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat?
- 3) Bagaimana pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;

2. Untuk menilai pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat; dan
3. Untuk mengukur dampak sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

1.5 Kontribusi Penelitian

1.5.1 Kontribusi Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya pemahaman tentang hubungan antara sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan dalam konteks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat atau memperluas teori-teori yang ada dalam pengelolaan anggaran publik, akuntabilitas, dan pengendalian keuangan pemerintah, serta memberikan dasar untuk penelitian lanjutan di bidang ini.
- 2) Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang variabel eksternal yang turut mempengaruhi kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pengaruh faktor-faktor sosial dan politik terhadap implementasi kebijakan anggaran dan kinerja pemerintah.

1.5.2 Kontribusi Praktis

- 1) Penelitian ini dapat menghasilkan model integrasi yang menghubungkan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan sebagai faktor-faktor yang saling terkait dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan

pendekatan holistik dan terintegrasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien.

- 2) Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah mengenai peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui peningkatan kejelasan sasaran anggaran, penguatan pengendalian akuntansi, dan perbaikan sistem pelaporan. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran publik.
- 3) Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan wawasan praktis tentang bagaimana instansi pemerintah dapat mengelola anggaran dengan lebih efisien dan akuntabel. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi instansi pemerintah untuk mengimplementasikan praktik terbaik dalam perencanaan anggaran, pengendalian akuntansi, dan pelaporan keuangan yang dapat memperbaiki kinerja.
- 4) Penelitian ini dapat mendorong peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah dengan menganalisis hubungan antara sistem pelaporan yang transparan dan akuntabilitas kinerja. Dengan membahas dampak dari sistem pelaporan berbasis teknologi, penelitian ini dapat mengarah pada pengembangan sistem pelaporan yang lebih baik untuk instansi pemerintah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
- 5) Penelitian ini berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dengan memberikan wawasan yang berguna bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan pemerintah, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan nasional secara lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberi manfaat bagi instansi pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat yang

mendapatkan manfaat langsung dari pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan transparan.